

perempuan, politik dan islam

By Ari Darmastuti

PEREMPUAN, POLITIK DAN ISLAM

Studi Tentang Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Partai-Partai
Islam dan Partai-Partai Berbasis Islam di Propinsi Lampung

Ari Darmastuti

Dosen FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This research is addressed to reply the questions of how functionaries of Islamic Political Parties view the political role of woman and how far the Islamic teachings, as the basic tenets of their belief, influence their views. The data are collected from a number of studies on the role of woman in political life, as well as articles from journals which discuss the similar issues. So far, as this study reveals, there is no different between the so-called conservative parties, such as PKS, PPP and PBB, and the moderate, such as PKB and PAN, in viewing the political role of women. These parties agree that women own the same rights to participate in political life as men do, although, to some degrees, there is still a slight differences among them in actuating their commitment in the real life.

Kata Kunci: Ideologi, Partai, Partai Islam, Peran Politik Perempuan

A. PENDAHULUAN

1. Kembalinya Partai-Partai Aliran

Situasi partai-partai politik masa reformasi seperti mengulang masa-masa yang dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Kembalinya pluralisme dalam kehidupan politik di Indonesia ini dikemukakan banyak penulis, diantaranya Kevin Raymond Evans (2003). Memahami pluralisme politik di Indonesia tidak sepenuhnya dapat menggunakan kerangka teoritis yang pada umumnya dikenal dalam masyarakat internasional, terutama masyarakat barat karena dalam konteks Indonesia, pengertian "kiri dan kanan" bukanlah berdasarkan pembelahan ideologi sosialis-kapitalis, tetapi antara sekularisme dan religiusitas.

Keanekaragaman partai-partai politik pada saat ini (terlihat pada pemilu 1999 dan 2004) menunjukkan pola yang mirip dengan pola tahun 1950-an. Kesamaan Pertama, kesamaan ideologi. Ideologi partai-partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dibagi dalam 4 kelompok besar. *Pertama* adalah ideologi *nasionalis*. Dalam spektrum ideologi, kaum nasionalis menempati posisi di tengah, antara kelompok kanan yang religius konservatif dan kelompok kiri yang sekuler radikal. Kaum nasionalis menolak dijadikannya agama sumber legitimasi bagi kekuasaan. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang sangat kuat dari sejak berakhirnya monarkhi absolut dengan kekuasaan meliputi wilayah dunia digantikan pemerintahan-pemerintahan nasional yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan masyarakat bangsa dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. Penolakan kaum nasionalis terhadap absolutisme monarkhi sekaligus menunjukkan penolakan terhadap dogma bahwa kekuasaan para monarkh adalah suci (*divine*) karena berasal dari firman dan waku Tuhan. Dengan demikian dapat dipahami mengapa pada masa tahun 1950-an terjadi friksi yang sangat tajam antara kaum nasionalis dengan kelompok-kelompok agama. Kaum nasionalis juga menolak dijadikannya doktrin sosialisme internasional karena pandangan ini sangat tidak sesuai dengan kepentingan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat melawan kepentingan kolonialis. Sosialisme mirip dengan kolonialisme dalam hal keduanya mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bukan masyarakat bangsa.

Kelompok ideologi *kedua* adalah kelompok ideologi *agama*. Dalam pandangan penganut ideologi ini, kekuasaan haruslah mencerminkan nilai-nilai ilahiah karena nilai kebenaran itu terletak dalam wahyu Tuhan. Dalam konteks situasi tahun 1950-an, kelompok Islam di Indonesia terpecah menjadi dua sub ideologi, yaitu :

Islam modernis yang diwakili oleh Masyumi yang merupakan wadah perjuangan politik kelompok Muhammadiyah. Embrio masyumi sebagai sebuah kekuatan politik yaitu Muhammadiyah telah muncul jauh sebelumnya, yaitu sekitar akhir abad 19. Muhammadiyah menginginkan pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur takhyul dan nativisme, unsur tradisionalisme pra Islam (seperti ritual-ritual yang berasal dari adat kuno) dan mendukung rasionalitas serta universalitas Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Islam tradisional diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial telah berdiri sejak tahun 1926, tetapi sebagai

organisasi politik dia baru muncul pada tahun 1952 setelah menyatakan keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik yang berdiri sendiri. Kelompok Islam tradisional menolak seruan untuk meninggalkan praktek-praktek tradisional oleh penganut ajaran Islam, sekaligus mereka mencurigai kelompok Islam modernis yang bersedia berhubungan dengan kaum kolonialis seperti dalam kesediaan kelompok modernis untuk menerima pendidikan gaya barat, cara berpakaian ala masyarakat barat.¹

Meski berbeda dalam memandang hubungan antara islam dan budaya setempat, kedua kelompok ini sama dalam melihat hubungan antara islam dengan negara. Kedua kelompok Islam ini (tradisional dan modern) mempunyai pandangan yang sama dalam melihat apakah agama perlu dijadikan landasan ideologi negara, atau menjadikan Indonesia sebagai negara berdasar agama (Islam tentunya), yaitu sama-sama melihat bahwa pernyataan perlunya agama dijadikan dasar negara tidak perlu karena dalam sejarahnya hal ini justru memecah-belah bangsa.

Variasi ideologi partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam juga bisa dibedakan berdasar orientasi perjuangan politiknya, yaitu antara partai-partai yang secara formal menjadikan Islam sebagai landasan ideologi partainya dan menginginkan sebuah negara berdasar agama (Islam tentunya) serta partai-partai yang tidak secara formal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi serta tidak menginginkan negara agama meski mereka juga menginginkan bahwa ajaran agama dijadikan landasan perilaku manusia. Perbedaan ini sering juga disebut sebagai perbedaan antara Islam struktural dan Islam kultural.

Kelompok ideologi *keempat* (kedua adalah Islam modernis dan kelompok ketiga adalah Islam tradisional) adalah *komunis*. Dalam diagram ideologi, kelompok komunis menempati pojok kiri paling jauh. Dalam dunia internasional, ideologi pada posisi pojok kiri jauh pada umumnya diterjemahkan sebagai ideologi sosialis radikal, tetapi dalam konteks Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai kelompok sekuler radikal.

Keragaman ideologi di Indonesia lebih rumit jika kita terjemahkan bahwa dalam ideologi religius terdapat kelompok yang lebih "sosialis" dibanding kelompok ideologi lain, terdapat kelompok religius yang lebih nasionalis dibanding lainnya. Maka diagram ideologi di Indonesia bukan

¹Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003), h. 3-4

semata penempatan pada ujung-ujung kutub dari sebuah garis ideologi, tetapi lebih merupakan pemencaran ideologi pada garis tersebut.

Kesamaan kedua antara sistim kepartaian di Indonesia masa demokrasi liberal dengan masa reformasi adalah dalam hal kelompok-kelompok partai yang muncul. Pemilu 1955 sebagai kulminasi demokrasi liberal di Indonesia diikuti oleh 36 partai sebagai hasil Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berisi himbauan tentang perlunya didirikan partai-partai politik guna menyongsong akan diadakannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan rakyat yang direncanakan untuk diselenggarakan bulan Januari 1946.² Pemilu 1955 meneguhkan sistem banyak partai dengan terdapatnya 27 partai yang berhasil memenangkan kursi parlemen. Meski demikian jika dilihat dari ideologi-ideologi partai yang memenangkan pemilu ini, maka dengan memperhatikan variasi sub-ideologi dari masing-masing ideologi, terdapat sekitar 7 kelompok partai yang memenangkan pemilu tersebut, yaitu Partai Komunis Indonesia (16%), Partai Nasional Indonesia (22%), Partai-partai Nasrani (Kristen dan Katholik: 5%), Partai-Partai Nasionalis lain (10%), NU (18%), Masyumi (21%), Partai-Partai Islam lain (5%), sisanya (3%) adalah suara yang tidak meraih kursi. Pemilu DPR tahun 1999 menghasilkan komposisi: PDIP (34%), Partai-Partai Nasionalis lain (3%), Partai Golongan Karya (22%), Partai Amanat Nasional (7%), Partai Kebangkitan Bangsa (13%), Partai Persatuan Pembangunan (11%), Partai-Partai Berbasis Islam lain (PBB, PK dan PDU: 6%), dan suara partai yang tidak meraih kursi (4%).³

Jika kita bandingkan kedua periode pemilu ini (1955 dan 1999) maka terlihat bahwa pemilu 1999 menunjukkan kalangan nasionalis meraih porsi suara terbesar, meliputi angka sekitar 59% , sementara pada pemilu 1955 mereka hanya meraih 22% suara. Tetapi jika kita menggabungkan suara PKI ke dalam kelompok ini (karena PKI lebih dekat dengan PDI yang sosialis sekuler, maka selisih suara kalangan nasionalis antara tahun 1955 dengan 1999 adalah 11% (dengan total suara PKI, PNI dan Partai-Partai Nasionalis lain 48%).

² Daniel Dakhidae, 1985, h 189-225. Kita mengetahui dari sejarah bahwa rencana ini mundur sampai dengan tahun 1955, yaitu tahun diselenggarakannya pemilu pertama di bawah negara Indonesia yang merdeka.

³ Kevin Raymond Evans, *Op. Cit.*, h. 55

Partai-Partai Islam dan berbasis Islam mengalami penurunan suara yang cukup signifikan pada pemilu 1999 dibanding pemilu 1955. Pada pemilu 1955, keseluruhan partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam (NU, Masyumi, PSII, Perti) memperoleh 44%, sementara pada pemilu 1999 partai-partai tersebut (PAN, PKB, PPP, PK, PBB, dan Fraksi PDU) hanya memperoleh 37%.⁴

Substansi pembahasan partai dalam perspektif sejarah ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan partai-partai Islam di Indonesia mengalami dinamika kelompok dan kekuatan kelompok yang cukup signifikan. Meski demikian sejarah kepartaian di Indonesia juga menunjukkan bahwa setelah masa deideologisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde baru selama kurang lebih 30 tahun, maka ideologi kembali menguat dalam diri partai-partai di Indonesia. Makna penting kedua dikemukakannya sejarah partai di Indonesia adalah bahwa membahas peran politik perempuan dalam perspektif partai-partai politik Islam dan partai-partai berbasis Islam tidak mungkin dilakukan tanpa membahas komposisi dan dinamika ideologi partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam. Oleh karena itu penting untuk dicatat di sini, bahwa dari sisi ideologi Islam (tradisional/konservatif versus modern, struktural versus kultural), terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan:

1. Partai-Partai Islam dan partai-partai berbasis Islam mengalami penurunan suara yang cukup signifikan pada pemilu 1999 dibanding pemilu 1955.
2. Partai Islam "modern", diwakili oleh Partai Amanat Nasional/PAN mengalami penurunan suara paling signifikan pada pemilu 1999 dibanding partai Islam yang lain.
3. Partai-partai Islam "kultural" (yang menginginkan masyarakat yang Islami yang bukan negara Islam) yang diwakili oleh Masyumi dan NU pada pemilu 1955 serta PAN dan PKB pada pemilu 1999 selalu memperoleh pendukung yang lebih banyak dari kalangan Islam dibanding dengan partai-partai Islam struktural.

⁴ *Ibid.*

2. Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Islam

Dalam sebuah masyarakat politik yang tradisi kulturalnya masih sangat kental seperti Indonesia⁵, maka setiap aktivitas politik pada umumnya akan dicari dasar pembenarnya berdasarkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang bersifat normatif ideal yang diyakini, baik nilai yang berasal dari budaya, adat maupun agama. Sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia, bagaimana pandangan Islam terhadap peran politik perempuan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan partai-partai Islam dan partai berbasis Islam terhadap peran politik perempuan tersebut.⁶

Pandangan Islam terhadap peran politik perempuan adalah sebuah konsep yang cukup membingungkan bagi orang yang masih awam dalam masalah ini, karena jika kita mengkaji berbagai kepustakaan tentang masalah ini kita akan mendapati argumen-argumen yang bertentangan yang sama-sama menyatakan sebagai pandangan yang paling benar berdasarkan ajaran Islam. Meski demikian, jika kita mencoba memahami lebih lanjut akar pertentangan ini, kita akan menjadi maklum mengenai terjadinya konflik pandangan. Dalam Islam, ijtihad atau upaya mencari makna ajaran dengan menggunakan akal sehat tidak dilarang, bahkan dianjurkan, terutama ijtihad ulama atau pemuka-pemuka agama Islam mempunyai peran besar dalam membentuk keyakinan-keyakinan para pengikut mengenai ajaran agama. Dalam konsep barat, ijtihad ulama ini akan menghasilkan apa yang disebut atau diartikan sebagai aliran, atau "denomination".

Ijtihad para ulama tentang peran perempuan dalam dunia publik dan secara khusus peran politik perempuan dapat dibagi menjadi dua:

1. Pandangan yang menolak peran publik dan peran politik perempuan. Pandangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa penciptaan manusia adalah bagian dari penciptaan alam, mengikuti sunah atau aturan alam, berdasarkan hukum-hukum dalam firman Al-Qur'an dan titah alam, atau hukum yang disusun (Al-Qur'an) dan hukum yang diciptakan (titah atau firman alam) (Murtadha

⁵ AD. Kusumaningtyas, *Pemilu 2004: Menagih Komitmen Parpol Islam untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender*, dalam *Jurnal Perempuan* No. 34 Tahun 2004, *Politik dan Keterwakilan Perempuan*, (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2004), h. 34-36

⁶ *Ibid.*

Muthahhari, 2000: XV). Menurut Muthahhari, sebagai makhluk yang diciptakan sebagai bagian dari penciptaan alam, maka keberadaan umat manusia tunduk pada hukum yang berlaku untuk makhluk di alam raya ini, yang hidup berpasang-pasangan, saling melengkapi dan tidak mendahului dan meniadakan, seperti terlihat pada firman berikut: "Tidaklah patut bagi matahari untuk mendahului bulan dan malampun mendahului siang. Masing-masing beredar pada orbitnya" (Q. 16: 40). Lebih lanjut Muthahhari mengemukakan bahwa "kondisi dasar bagi kebahagiaan pria maupun wanita, dalam kenyataannya bagi seluruh umat manusia, ialah bahwa masing-masing harus terus bergerak pada orbitnya sendiri. Kebebasan dan persamaan akan bermanfaat selama tidak ada dari mereka yang meninggalkan orbit dan arahnya yang alami".⁷ Dalam pandangan kelompok ini, peran publik perempuan lebih merupakan hasil "provokasi kapitalisme" yang menginginkan mendapat tenaga kerja murah, mendapatkan pasar yang lebih luas bagi produk-produk kapitalisme, dan menjadikan perempuan sebagai "antek kapitalisme" karena menjadikan dirinya sebagai agen-agen pemerintah negara-negara kapitalis dan kaum kapitalis yang ingin memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang, termasuk masyarakat Islam di negara-negara berkembang tersebut.⁸ Dengan kritis Muthahhari melihat bahwa ide persamaan dan kebebasan justru menjadikan perempuan tidak lagi terlindungi karena atas ide persamaan tersebut tidak boleh lagi ada undang-undang atau konstitusi yang mendiskriminasi salah satu jenis kelamin, sehingga laki-laki tidak boleh diberi beban menanggung keluarga atas dasar ide persamaan ini, bahwa pekerja perempuan di pabrik harus diberi kerja yang sama dengan laki-laki, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat harus kembali kepada fitrah alamnya, masing-masing beredar pada "orbitnya" karena kekacauan yang terjadi dalam masyarakat adalah karena perempuan telah bangkit menentang aturan yang alami.⁹

Pandangan-pandangan ini di Indonesia memperoleh banyak pengikut, diantaranya dari kalangan Hizbut Tahrir yang dengan gencar melancarkan serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok (pada umumnya perempuan) yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai masalah peran perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Dalam pandangan kelompok ini, termasuk Muthahhari juga meyakini, kehidupan perempuan memang rata-rata masih buruk, berbagai data menunjukkan hal ini. Tetapi menyelesaikan masalah tidak bisa melalui pemecahan yang justru menjadi sumber masalah lainnya. Pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir dan feminis-feminis barat telah menyebabkan kerusakan yang lebih parah, dibuktikan dengan semakin jauhnya masyarakat barat dari nilai-nilai moralitas dan jauh dari menciptakan hubungan yang ideal antara laki-laki dan perempuan, telah membuat banyak perempuan menolak mengambil peran reproduksi, kehidupan seksual di luar nikah menjadi gejala umum, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pandangan kelompok ini pemecahan satu-satunya adalah dengan kembali ke firman Al-Qur'an (tersusun lewat ayat dan tercipta lewat alam), yaitu kembali ke orbit masing-masing, dimana peran perempuan sesuai dengan fitrahnya terutama adalah mengurus dunia domestik karena perempuan tidak dituntut melakukan peran publik.

2. Pandangan yang mendukung peran publik dan peran politik perempuan. Bagi kalangan ini, bagaimana pandangan Islam tentang peran publik dan peran politik perempuan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menterjemahkan ajaran Islam, dan karena mufassir pada umumnya laki-laki, sementara laki-laki berbeda dari perempuan, maka apa yang disebut sebagai ajaran Islam selama ini sebenarnya adalah tafsir yang bias atas ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini telah menimbulkan sikap misoginis (membenci perempuan) dalam setiap informasi yang disampaikan kepada umat suatu agama, termasuk di dalamnya umat Islam.¹⁰ Oleh karena itu, pendukung pandangan ini menyatakan bahwa ajaran Islam harus ditafsirkan kembali dengan penafsiran yang lebih adil, dengan meletakkannya

¹⁰ Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, (Surabaya: Penerbit Dunia Ilmu, 1997), h vii, xvi; bandingkan AD Kusumanintyas, *Op. Cit.*, h 37

dari dua sisi pandang, yaitu sisi perempuan dan laki-laki.¹¹ Aturan-aturan yang selama ini membelenggu perempuan dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat publik adalah penafsiran yang bias atas berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk terdapat banyak hadist maudlu atau palsu.¹²

Dalam pandangan kelompok ini inti ajaran Islam adalah tauhid yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan manusia dan manusia semata-mata terikat oleh hukum-hukum berdasar firman Allah seperti terlihat pada Al-Qur'an. Islam datang untuk mempertanyakan dan membongkar berbagai kemampunan yang diciptakan manusia yang telah menyebabkan terjadinya ketertindasan atas kelompok yang lebih lemah.¹³ Oleh karena itu Islam sebenarnya menjamin keadilan, terutama bagi kelompok lemah yang selama ini tertindas terutama dalam masyarakat Mekah yang menjadi asal muasal turunnya ajaran Islam. Jaminan keadilan yang dibawa oleh ajaran Islam itu meliputi berbagai hak, bukan hanya di wilayah alam domestik rumah tangga, tetapi juga adalah dunia publik.

Di Indonesia dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, melalui dua tokoh utamanya Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, mempunyai pandangan yang lebih moderat tentang peran politik perempuan ini, yaitu tidak mempersoalkan peran politik perempuan.¹⁴ Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Tidaklah mengherankan bahwa pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul. Dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik,

¹¹ Fatima Mernisi, *Loc. Cit.*, bandingkan Badriyah Fayumi, Mursyidah Thahir, Anik Farida dan Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001)

¹² *Ibid.*, h vii, xvi; bandingkan AD Kusumanintyas, *Op. Cit.*, h 37

¹³ Badriyah..., *Loc. Cit.*

¹⁴ AD. Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, h. 34

ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya".¹⁵ Meski demikian kelompok ini juga mengakui bahwa jaminan keadilan yang dibawa oleh ajaran Islam seringkali disalahartikan sebagai "kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Akibatnya, yang banyak muncul ke permukaan adalah perempuan-perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi obyek kapitalisme, perempuan-perempuan yang merasa dirinya modern karena menggunakan produk-produk mutakhir, baik dari segi pakaian dan asesoris, maupun alat-alat teknologi canggih seperti handphone dan sebagainya. Atau sebaliknya, perempuan-perempuan yang terkungkung di rumah karena menganggap keluar rumah merupakan suatu aib dan cela sehingga mereka tertinggal dalam segala hal, termasuk pendidikan, informasi dan kemajuan teknologi".¹⁶

Pendapat lain yang menyatakan bahwa terdapat keragaman cara ulama menterjemahkan ajaran Islam juga dikemukakan oleh AD Kusumaningtyas. Dengan mengutip pendapat Syafiq Hasyim, Kusumaningtyas menyatakan bahwa " Mengapa hanya sedikit perempuan yang terlibat di dunia politik, terutama di kalangan Islam?".¹⁷ Fenomena ini sangat berkait dengan keragaman pandangan para ulama mengenai keterlibatan kaum perempuan di dunia politik. Syafiq Hasyim dalam sebuah bukunya tentang perempuan dalam fikih politik, menyebutkan ada tiga pendapat yang berkembang yang membicarakan perempuan di dunia politik. *Pertama*, pendapat konservatif yang mengatakan bahwa Islam apalagi fikih, sejak kemunculannya di Mekah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan untuk terjun ke ruang politik. *Kedua*, pendapat liberal progressif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenankan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. *Ketiga*, pendapat apologetis yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada bagian wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu".

¹⁵ Badriyah..., *Op. Cit.*, h 42.

¹⁶ *Ibid*, h. 43.

¹⁷ AD Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, h. 37-38

Jelas bahwa peran politik perempuan dalam perspektif partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam sangat tergantung kepada "aliran" para elit partai, terutama pengurus partai. Jika pengurus partai-partai termasuk dalam aliran konservatif, maka mereka akan mendukung argumen yang tidak memperbolehkan atau paling tidak tidak mendorong peran politik perempuan. Sebaliknya jika mereka termasuk dalam kelompok liberal progresif maka mereka akan mendukung ide peran politik perempuan. Mereka juga bisa masuk dalam aliran yang apologetis, yang membolehkan perempuan masuk dunia politik, tetapi pada peran-peran yang lebih mendekati peran ibu, bukan pada posisi kepemimpinan.

Penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai (1) bagaimana partai-partai politik Islam dan partai-partai berbasis Islam memandang peran politik perempuan, (2) bagaimana perspektif pengurus partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam dalam melihat hal yang sama, serta (3) apa tindakan-tindakan yang dilakukan atau tidak oleh partai dan pengurus partai sebagai refleksi keyakinan ideologinya tentang peran politik perempuan tersebut?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan masalah

Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan penelitian tersebut di muka, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan kelembagaan atau *institutionalism*.¹⁸ Pendekatan ini diterapkan dalam penelitian ini untuk mengungkap bagaimana keyakinan politik atau ideologi dicerminkan dalam konstitusi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam.
2. Pendekatan perilaku atau *behavioralism*.¹⁹ Pendekatan ini dipergunakan untuk dapat menjelaskan mengenai bagaimana keyakinan ideologis membentuk sikap dan perilaku para pengurus partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam.

¹⁸ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h.135-167

¹⁹ *Ibid.*, h 209-286.

2. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada masalah:

1. Perspektif partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam terhadap peran politik peran perempuan dilihat dari platform atau dasar ideologis partai dalam Anggaran Dasar partai.
2. Perspektif pengurus partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam dilihat dari pandangan-pandangan mereka terhadap: (1) peran politik perempuan dan (2) isu kuota atau keterwakilan 30% seperti tercermin dalam Pasal 65 Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal ini akan dilihat apakah jika terjadi penerimaan atau penolakan didasarkan atas alasan yang substansial berupa pandangan yang sangat mendasar atau sekedar persoalan teknis, seperti keterbatasan posisi dan alasan teknis lainnya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh partai-partai dan pengurus partai-partai Islam sebagai cerminan penerimaan atau penolakan terhadap ide peran perempuan dalam politik

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam terhadap peran politik perempuan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu lokasi penelitian adalah pada kepengurusan partai tingkat Provinsi Lampung. Untuk dapat menentukan dengan tepat lokasi penelitian, maka terlebih dahulu ditentukan apa yang disebut sebagai partai Islam dan partai berbasis Islam. Menurut Azyumardi Azra seperti dikutip AD Kusumaningtyas, sebuah partai disebut sebagai partai Islam jika : (1) partai menggunakan agama Islam sebagai dasar ideologi mereka seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (2) partai-partai yang menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologinya tetapi pada saat yang sama menggunakan simbol-simbol Islam seperti bulan dan bintang, ka'bah serta simbol lainnya, antara lain Partai Cinta Damai (PCD), Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII); serta (3) partai-partai yang pengurus serta

basis masanya adalah muslim seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).²⁰

Dalam penelitian ini lima partai dipilih, 3 (tiga) partai Islam (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang) serta 2 (dua) partai berbasis Islam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) di Provinsi Lampung

4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data sekunder dan dokumentasi, berupa:

- (1) Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tema-tema sejenis, terutama berbagai penelitian oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung.
- (2) Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang memuat berbagai data yang diperlukan.
- (3) Dokumentasi platform partai, terutama yang terdapat dalam Buku Almanak Parpol di Indonesia dan buku tentang partai politik terbitan Kompas Grup.

5. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan. Beberapa tabel dipergunakan untuk mempermudah pembaca memahami tema-tema yang menjadi fokus penelitian, sekaligus untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih sistimatis. Teori yang dalam penelitian ini diartikan sebagai "sebuah sudut pandang" atau *point of view*,²¹ dalam hal ini sudut pandang kelembagaan dan sudut pandang perilaku, dipergunakan untuk menganalisis perbandingan tentang pandangan partai dan pandangan pengurus partai-partai Islam terhadap peran politik perempuan. Teori ini juga sekaligus untuk melakukan konfirmasi apakah benar asumsi pandangan kelembagaan yang menyatakan bahwa konstitusi partai sebagai lembaga dibentuk oleh dan mencerminkan ideologi partai, dan juga apakah perilaku pengurus partai sebagai individu pelaku politik dipengaruhi oleh keyakinan ideologinya.

²⁰ AD. Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, h. 36

²¹ Vernon van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analysis*, (California: Stanford University Press, 1960), h. 98-100

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Platform Partai Sebagai Cerminan Ideologi

Dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa secara umum, pandangan partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam dalam kaitan dengan peran politik perempuan terbagi menjadi dua:

Tabel 1
Dualisme Kategori Partai Islam

Kategori Partai Islam	Keterangan
Partai Islam Modernis	Adalah partai yang bersikap sedikit liberal dalam menafsirkan status kaum perempuan. Mereka memprogramkan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kaum perempuan diperbolehkan bekerja di sektor publik, berpartisipasi dalam kegiatan politik, bahkan diperbolehkan untuk menjadi kepala negara.
Partai Islam Fundamentalis	Adalah partai yang menolak persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Partisipasi perempuan yang disebutkan dalam bidang-bidang di atas dibatasi. Untuk keluar rumah, kaum perempuan harus dikawal oleh suami atau muhrimnya. Kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja di sektor publik, dan secara tegas dilarang untuk menjadi kepala negara.

Sumber: AD Kusumaningtyas, 2004: 40

Substansi isi Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan pandangan terhadap peran politik perempuan diantara berbagai partai politik Islam memang nyata. Perbedaan pandangan tersebut lebih lanjut tercermin dalam platform partai yang tercermin dalam Tabel 2, terutama dalam kasus PBB yang masih menunjukkan pandangan konservatif dalam melihat peran politik perempuan. Meski demikian, data selebihnya menunjukkan bahwa partai-partai yang secara formal menggunakan label Islam dan berideologikan Islam, terutama PPP dan PK tidak lagi menunjukkan pandangan yang secara tegas melarang perempuan untuk berperan dalam kehidupan politik. Dalam Tabel 3 malah diperlihatkan pandangan tokoh PK di Provinsi Lampung yang menganggap bahwa peran politik perempuan justru adalah ibadah jika dilakukan untuk kebaikan. Secara umum tokoh-tokoh partai Islam dan partai-partai berbasis Islam juga

berpendangan positif atau paling tidak tidak menentang peran perempuan dalam kehidupan politik.

Tabel 2
Platform Perempuan dalam Lima Parpol Islam di Indonesia

Par-tai	Platform tentang isu perempuan	Prioritas program terkait dengan perempuan
PBB (3)	Masih konservatif dalam menghargai perempuan meskipun sudah mengakomodasi ide-ide modern tentang pemberdayaan perempuan	Membuat persyaratan keterlibatan perempuan di dunia politik yaitu memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai, semangat untuk membela hak-hak mereka sendiri, memiliki kredibilitas di kalangan masyarakatnya, diakui oleh masyarakat umum dan memiliki ide-ide yang penting dan strategis bagi masyarakat.
PPP (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih melihat masalah pendidikan perempuan - Pemerintah telah memberi kesempatan tetapi kaum perempuan tidak dapat mengaksesnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. - Pendidikan merupakan alat untuk meraih kesempatan yang setara dengan laki-laki. - Mengkritik gerakan perempuan yang hanya menuntut hak saja tanpa menyadari kewajibannya.
PAN (13)	Partai ini tidak setuju dengan diskriminasi gender. Menurut mereka masih sulit bagi perempuan untuk memainkan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat paternalistik.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan pengembangan kesempatan bagi kaum perempuan. - Melihat perempuan merupakan lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia bahkan dunia. - Membentuk departemen perempuan sebagai sentral aktivis partai dari tingkat nasional hingga tingkat regional.
PKB (15)	Melihat budaya sebagai sumber utama keterbelakangan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan perlu setara dengan laki-laki. - Di dalam rumah istri harus menjadi mitra yang setara dengan suami. - Dalam kehidupan politik perempuan harus ikut memainkan peran.

PKS (16)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengizinkan perempuan menempati posisi kunci bila dibutuhkan. - membenarkan kader perempuan menempati posisi di parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 	Kemunduran posisi perempuan merupakan kesalahan Orba.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Sumber: AD Kusumaningtyas, 2004: 41

Meski pada umumnya tokoh-tokoh partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam di Provinsi Lampung tidak mempersoalkan peran politik perempuan, bahkan dalam kasus PK terlihat mereka cukup mendukung peran politik perempuan, mereka pada umumnya masih mempunyai "stereotyping" yang tegas tentang peran-peran perempuan. Mereka masih berpandangan bahwa peran utama perempuan adalah dalam rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami dan rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dari keseragaman jawaban tokoh PK dan PBB yang diwawancarai. Mereka menyatakan bahwa peran publik dan peran politik perempuan boleh dilakukan, *asal mereka tidak meninggalkan tugas utama mengasuh anak, mengurus suami dan mengurus rumah tangga*. Jelas terlihat dari jawaban ini bahwa gender stereotyping masih sangat kuat, sekaligus jawaban ini menunjukkan bahwa masih terdapat *ketidakkonsistenan antara jawaban formal* (sebagai pengurus) partai yang menyatakan mendukung dan tidak menghalangi peran politik perempuan *dengan sikap sebagai individu* yang tidak siap mengambil peran domestik.

Ketidakkonsistenan ini mempunyai beberapa penyebab. *Pertama* adalah keyakinan ideologis yang terbentur dengan kewajiban konstitusional. Secara ideologis tokoh partai mungkin menentang peran politik perempuan, tetapi mereka mempunyai kewajiban konstitusional untuk mendukung keberadaan Undang-Undang nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dalam salah satu pasalnya menyatakan dengan tegas adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan *affirmative action* pemberdayaan politik perempuan. Penyebab *kedua* adalah benturan antara keyakinan politik dengan pertimbangan politis untuk mendapat dukungan. Meski secara pribadi tokoh politik mempunyai keyakinan ideologis konservatif tentang peran politik perempuan, tetapi pernyataan secara terbuka tentang hal ini akan menimbulkan kerugian politis, karena partai bisa kehilangan dukungan

dari pemilih perempuan. *Ketiga* adalah benturan antara kewajiban konstitusional dengan kebutuhan pribadi. Secara sadar mereka memahami harus mendukung peran politik perempuan karena memang tidak terdapat dasar kuat untuk menolak keberadaan perempuan dalam dunia politik, tetapi sebagai pribadi mereka mempunyai kebutuhan akan peran ganda perempuan ini, eksistensi sebagai individu laki-laki terancam dengan terjunnya perempuan ke dalam dunia publik, terutama dunia politik yang selama ini mereka maknai sebagai "wilayah khusus laki-laki". Maka dibuatlah pernyataan tentang kewajiban perempuan untuk menyelesaikan masalah domestik terlebih dulu sebelum mengambil peran publik dan peran politik.

Tabel 3
Persepsi Mengenai Partisipasi Politik Perempuan

No	Partai	Persepsi Tentang Partisipasi Politik Perempuan
1	PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi politik perempuan dalam ajaran Islam tidak dibatasi 2. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi politik kecuali untuk menduduki jabatan kepala negara 3. Partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat pada masa Rasulullah dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik 4. Partisipasi politik perempuan tidak dibatasi namun tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai pendidik anak dalam keluarga
2	PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi politik perempuan dalam ajaran Islam cukup diakui, namun secara kodrat perempuan selalu berada dalam kondisi tidak stabil untuk berpartisipasi secara aktif, seperti ketika perempuan menjadi kepala negara dan harus bertugas ketika melahirkan 2. Partisipasi politik perempuan menurutnya hanya sebatas pada partisipasi yang tidak krusial, karena keterbatasan yang dimiliki perempuan 3. Tugas perempuan hanyalah menyempurnakan keberadaan laki-laki
3	PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi politik perempuan dalam ajaran Islam adalah hal positif, terbukti dari sejarah Rasulullah yang banyak melibatkan perempuan seperti ikut berperang dan dalam musyawarah 2. Perempuan mempunyai hak berpartisipasi, terdapat tanggung-

		jawab sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola pemerintahan 3. Dalam berpartisipasi perempuan harus senantiasa mengingat kodrat utama untuk mengasuh dan memberi perlindungan kepada anak
4	PKS	1. Partisipasi politik perempuan dalam Islam tidak dibatasi, kecuali untuk menduduki jabatan kepala negara 2. Meski perempuan mempunyai hak peran publik, peran sebagai ibu dan pengasuh anak tidak boleh ditinggalkan, harus imbang antara keduanya
5	PKS	1. Islam tidak membatasi peran politik perempuan 2. Perempuan tidak boleh meninggalkan fungsi sebagai ibu terhadap anak-anak yang tidak tergantikan oleh laki-laki
6	PKS	1. Partisipasi politik perempuan dalam Islam adalah positif dan diperbolehkan untuk kebaikan 2. Perempuan banyak keterbatasan, oleh karena itu dalam partisipasi mestinya menyesuaikan dengan keterbatasan, tersebut, antara lain dalam kekuatan fisik
7	PKS	1. Partisipasi politik perempuan sangat diperbolehkan, terlihat dari sejarah Rasulullah 2. dalam berpartisipasi tidak boleh melupakan kodrat untuk mengurus dan merawat anak dalam keluarga

Sumber: Disarikan dari Yonalita Veviã, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Pengurus Partai-Partai Politik Islam (skripsi)*, 2003.

Konsistensi pandangan ideologis partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam terhadap peran politik perempuan dapat dilihat dari sikap partai dan perilaku tokoh partai dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2004. Data berikut menunjukkan bahwa tokoh partai politik belum sepenuhnya menunjukkan sikap mendukung peran politik perempuan. Hal ini terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh di PKS dan PBB bahwa tidak ada mekanisme khusus yang dipergunakan untuk mendorong peran politik perempuan seperti menjadi substansi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang nomor 12/2003. Padahal, jika mereka memiliki kesadaran tentang masalah yang dihadapi perempuan, maka partai dan pengurus partai tentunya akan melakukan mekanisme khusus untuk mendorong agar tingkat peran politik perempuan menjadi lebih baik karena secara faktual perempuan masih

memiliki begitu banyak hambatan untuk memasuki dunia politik, dunia yang sebelumnya secara kultural dianggap asing untuk perempuan. Secara khusus, penelitian di PBB dan PKS menunjukkan tidak terdapat kriteria khusus dan mekanisme khusus untuk caleg perempuan.

Di Partai Amanat Nasional, kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan di PK dan PBB Tabel 5). PAN tidak menerapkan mekanisme *safe seat* (kursi aman) untuk caleg perempuan. Artinya, perempuan tidak ditempatkan pada nomor yang pasti akan terpilih, bahkan dari sumber yang dikutip dalam data penelitian yang lebih rinci, terdapat laporan yang menyatakan adanya upaya menggeser seorang caleg perempuan dari nomor jadi ke nomor yang lebih rendah tanpa memberi kesempatan waktu memadai perempuan caleg tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keputusan pimpinan partai. Di PAN juga tidak terdapat perempuan yang menjadi anggota tim untuk menilai skor para caleg sehingga aspirasi perempuan dalam pen-skoran tidak tertampung. Ketentuan bahwa caleg harus memberi kontribusi dana pemilu bagi partai juga menjadi petunjuk tidak responsifnya pengurus partai terhadap kesulitan perempuan yang pada umumnya tidak memiliki dana, seperti dinyatakan seorang responden dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, pernyataan formal pengurus partai yang menyatakan bahwa partai mendukung peran politik perempuan tidak dinyatakan lebih lanjut dalam sikap dan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen tersebut.

Terhadap ketidak-berhasilan partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam untuk memenuhi komitmen formalnya (mendukung peran politik perempuan) dikemukakan beberapa alasan, diantaranya kurangnya sumberdaya manusia perempuan yang memenuhi kriteria partai untuk menjadi calon anggota legislatif, sedikitnya jumlah perempuan yang mendaftar menjadi caleg, kurangnya dana untuk kontribusi proses pemilu, kurang kepercayaan diri, beratnya beban ganda, sampai dengan ketakutan terganggunya tugas da'wah. Hambatan-hambatan ini adalah hambatan khas perempuan yang jarang ditemukan pada caleg laki-laki. Jelas bahwa kebanyakan perempuan "belum selesai dengan masalah dirinya sendiri" ketika mau terjun ke dunia politik. Padahal tidak mungkin perempuan dapat mengemban tugas berat di dunia politik ketika masalah-masalah pribadi masih menghambat. *Affirmative action* partai yang semestinya diambil dalam konteks ini

dengan menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis di partai maupun sampai dengan menyediakan dukungan finansial dan materi (bisa dalam bentuk tidak membebani caleg perempuan dengan persyaratan uang kontribusi yang besar, menyediakan mekanisme asistensip, dan sebagainya). Mekanisme-mekanisme demikian sama sekali tidak disediakan oleh partai-partai islam dan partai-partai berbasis Islam di Provinsi Lampung.

Tabel 4
Kriteria Khusus, Mekanisme Khusus dan Hambatan dalam Penempatan Caleg Perempuan di PKS dan PBB dalam Pemilu 2004

Partai	Kriteria Khusus	Mekanisme Khusus	Hambatan yang ditemui
PBB	Tidak ada	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang SDM di partai 2. Wanita tidak cukup dana 3. Syarat dari KPU 4. Sedikit yang mendaftar
PKS	Tidak ada	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas domestik 2. Tidak cukup waktu untuk memperkenalkan diri kepada konstituen 3. Perempuan menganggap dapat mengganggu tugas dakwah 4. Capai karena beban kerja ganda 5. Manajemen diri masih kurang 6. Kurang percaya diri

Sumber: Disarikan dari M. Deden Lily Qz., *Dampak Ketentuan Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Terhadap Penempatan Calon Anggota Legislatif Dari Partai Politik yang Berazaskan Islam (skripsi) 2004: 83-101.*

Tabel 5
Rekrutmen Caleg Perempuan di PAN

Syarat-syarat Rekrutmen	Implementasi Syarat-syarat	Penentuan Nomor Urut
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengurus PAN (5) 2. Memenuhi UU12/2003 (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada perlakuan yang berbeda (7) 2. Tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan skoring (7) 2. Tidak menggunakan sistim zig zag (7)

3. Kader Partai dan masyarakat (7)	hambatan dalam partai (3)	3. Tidak ada kesulitan menentukan skor (5)
4. Mengikuti pengkaderan (3)	3. Adanya kesulitan perempuan (4)	4. Ada tim khusus untuk menilai skor caleg (5)
5. Memberi kontribusi dana (5)	4. Tercipta iklim kondusif untuk perempuan (4)	5. Tidak ada kecurangan penempatan nomor (5)
6. Kesempatan sama kepada laki-laki dan perempuan (6)		6. Efektivitas sistim skoring (2)

Sumber: Diolah dari Nia Maesyarah, *Diskriminasi Gender dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Partai Amanat Nasional (PAN) (Studi di DPW PAN Lampung)*. (skripsi), 2004.

Catatan: angka dalam tanda kurung adalah jumlah informan yang menjawab untuk aspek yang bersangkutan dari seluruh jumlah informan 7 orang

Tabel 6
Seleksi Calon Anggota Legislatif di DPW PKS Lampung Tahun 2004

Jenis Seleksi	Dimensi Dalam Proses Seleksi
Pemilihan Umum Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan syarat untuk caleg laki-laki dan perempuan, keduanya harus memenuhi kriteria syarat umum (ketentuan UU serta ketentuan KPU) dan kriteria khusus (kriteria dari PKS) 2. Memenuhi kriteria ketentuan sebagai kader (dari tingkat dasar sampai lanjut) 3. Dilakukan mekanisme affirmative action untuk caleg perempuan dalam bentuk dukungan dana sebesar 50% 4. Caleg perempuan telah mempunyai kapasitas pendidikan yang setara dengan laki-laki
Pemilihan Umum Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caleg harus mampu memenuhi kriteria yang sama dengan caleg internal 2. Harus memiliki basis massa yang jelas 3. Ditempatkan pada nomor kedua setelah hasil pemilihan umum internal 4. Pemilihan umum eksternal telah menyumbang 2 caleg eksternal (1 laki-laki dan 1 perempuan)

Sementara itu, keberadaan perempuan dalam dunia politik adalah penting dalam rangka perwakilan kepentingan politik perempuan. Kebijakan-kebijakan partai pada umumnya bias terhadap kepentingan perempuan ketika perempuan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan politik. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter Parliamentary Union dalam beberapa laporan tahunannya tentang kemajuan peran perempuan dalam lapangan politik di berbagai negara di dunia (IPU, 1999; IPU 2000).

Untuk melihat isu makna penting peran perempuan dalam kehidupan politik dan apakah perempuan telah mengambil peran penting di partai politik, data yang dikutip menunjukkan bahwa tingkat peran perempuan dalam dunia politik, terutama dalam pengelolaan partai politik masih sangat rendah (Tabel 7). Jumlah perempuan dalam kepengurusan partai (di PKB) hanya berkisar 12,55 sampai sekitar 25%. Jika diingat bahwa PKB adalah partai yang cukup sensitif terhadap aspirasi politik perempuan terlihat dari komitmen yang selama ini didengungkan para tokohnya, maka terlihat bahwa pemberian kesempatan kepada perempuan untuk aktif di partai masih rendah. Rendahnya peran perempuan di partai (PKB) juga terlihat dari data yang ditampilkan yang menyatakan bahwa peran perempuan dalam penyusunan berbagai alternatif kebijakan serta dalam pemilihan alternatif keputusan masih rendah. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara komitmen ideologis yang mendukung peran politik perempuan dengan kebijakan dan tindakan nyata oleh partai dan pengurus partai.

Tabel 7
Peran Perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung

Aspek	Dimensi Peran
Kepengurusan	
Komisi A	L: 13 P: 5
Komisi B	L: 16 P: 5
Komisi C	L: 14 P: 2
Identifikasi Masalah Masalah	Sering dalam bentuk tulisan maupun laporan <ol style="list-style-type: none"> 1. Soal perempuan 2. Pembelaan hukum untuk perempuan 3. Akses perempuan dalam pembuatan keputusan 4. Pemberdayaan politik perempuan 5. Konsolidasi partai 6. Kinerja partai

Pembuatan Alternatif Keputusan	Pola peran perempuan dalam pembuatan alternatif keputusan di partai adalah dari kadang-kadang terlibat sampai dengan selalu terlibat
Memilih Alternatif Keputusan	Pola peran perempuan dalam pemilihan alternatif keputusan adalah belum terlibat. Pola pemilihan alternatif keputusan di partai seringkali menemui deadlock (jalan buntu)

Sumber: Diolah dari Sumarlen, *Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Partai Politik (Studi di DPW PKB Lampung) (skripsi)*, 2004.

D. KESIMPULAN

Berbagai data yang ditampilkan di muka menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara partai-partai Islam (yang diasumsikan konservatif dalam melihat peran politik perempuan) dengan partai-partai berbasis Islam (yang diasumsikan lebih moderat dalam melihat peran perempuan dalam politik) dalam melihat peran politik perempuan. Pada awalnya, berdasar kerangka teoritis diasumsikan perbedaan ideologi partai akan memberi pengaruh signifikan dalam cara partai memandang peran politik perempuan. Dilihat dari platform ideologis, memang terlihat perbedaan tersebut, tetapi dilihat dari cara pandang pengurus partai, maka perbedaan tersebut tidaklah terlalu tajam. Memang platform ideologis dan pandangan pengurus partai-partai berbasis Islam sedikit lebih "progresif" dalam melihat peran politik perempuan, tetapi progresivitas tersebut tidak terlihat dalam komitmen tindakan. Justru tindakan nyata dalam mendukung peran politik perempuan ditunjukkan oleh PKS (sebuah partai berplatform Islam dan dianggap "keras" dalam menegakkan syari'at Islam). dalam bentuk pemberian dukungan dana (mengurangi beban kontribusi dana pemilu) bagi caleg perempuan. Oleh karena itu, penelitian dengan data sekunder ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang sangat tajam antara partai-partai Islam (konservatif) dan partai-partai berbasis Islam (moderat) dalam memandang dan bersikap terhadap peran perempuan dalam dunia politik. Variasi sikap ditemukan diantara partai-partai Islam dimana PKS menunjukkan komitmen yang lebih besar dibanding PPP dan PBB, baik komitmen ideologis maupun komitmen dukungan. Sementara itu dua partai berbasis islam, yaitu PKB dan PAN, secara ideologis mendukung peran perempuan dalam dunia politik, meski demikian dukungan tindakan masih belum terlihat nyata.

Temuan ini menunjukkan bahwa partai-partai Islam dan partai-partai berbasis Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan ideologis dan sikap yang cukup berbeda dibanding dengan partai-partai Islam di belahan dunia lain, terutama yang terjadi dunia Arab, khususnya di Iran (seperti terlihat dalam sikap yang ditunjukkan oleh pendapat Muthahhari di bagian awal laporan ini). Karakter demokrasi Indonesia yang khas, yang lebih dipengaruhi oleh semangat gotong royong dan mekanisme musyawarah mufakat dan inklusif sedikit banyak tentunya memberi pengaruh terhadap arah ideologis dan sikap partai-partai tersebut. Meski komitmen partai masih belum terlihat jelas, hal ini tentu memberi keuntungan kepada kelompok perempuan, kelompok yang masih merupakan peserta baru dalam dunia politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Agustin, Yosep, *Proses Seleksi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Memenuhi 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2004 (Studi di DPW PKS Lampung)*, Skripsi Unila, Bandar Lampung, 2005.
- Dyke, Vernon Van. *Political Science: A Philosophical Analysis*, Stanford University Press, Stanford, California, 1960.
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003.
- Fayumi, Badriyah, Mursyidah Thahir, Anik Farida dan Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001
- Kusumaningtyas, AD. 2004, *Pemilu 2004: Menagih Komitmen Parpol Islam untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender*, dalam *Jurnal Perempuan nomor 34 tahun 2004, Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Yayasan Jakarta: Jurnal Perempuan, 2004.
- Lily Qz., M. Deden, *Dampak Ketentuan Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Terhadap Penempatan Calon Anggota Legislatif Dari Partai Politik yang Berazaskan Islam*, Bandar Lampung, Skripsi Unila, 2004
- Maesyaroh, Nia, *Diskriminasi Gender dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Partai Amanat Nasional (PAN) (Studi di PW PAN Lampung)*, Bandar Lampung: Skripsi Unila, 2004
- Mernisi, Fatima, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, Surabaya: Penerbit Dunia Ilmu, 1997
- Muthahhri, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta; Lentera; 2000.
- Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Shahabiyat*, Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Suryakusuma, Julia I, *Almanak Parpol Indonesia*, Tanpa Tahun.

- Sumarlen, *Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Partai Politik (Studi di DPW PKB Lampung)*, Bandar Lampung: Skripsi Unila, 2004
- Vevia, Yonalita, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Pengurus Partai-Partai Politik Islam*, Bandar Lampung: Skripsi Unila, 2003

DAFTAR Isi

Karakteristik Tafsir Al-Azhar Karya Hamka

Oleh: Bukhori A. Somad___ 173-188

Perempuan, Politik dan Islam: *Studi Tentang Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Partai-Partai Islam dan Partai-Partai Berbasis Islam di Propinsi Lampung.*

Oleh: Ari Darmastuti___ 189-214

Pidana Mati atas Delik Pembunuhan: *Studi Komparatif dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.*

Oleh: A. Gani___ 215-232

Pesantren dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Oleh: Damanhuri___ 233-256

Pergeseran Paradigma Pemikiran dan Gerakan Sosial NU

Oleh: Firdaus Muhammad___ 257-274

Prilaku Pendelegasian dan Kateristik Pemimpin serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Organisasi Muhammadiyah: *Suatu Survei Respons Anggota Muhammadiyah.*

Oleh : Thontowi Jauhari___ 275-292

Implementasi Fungsi Pengawasan Pengembangan Mutu Dosen IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Oleh: M.Akmansyah___ 293-312

Fungsi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam Pengembangan Masyarakat Islam: *Studi pada Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Propinsi Lampung.*

Oleh: Faizal___ 313-328

Terapi Model Thariqat Qadariyyah Naqsyabandiyah dalam Membantu Remaja Korban Penyalahgunaan NAZA: *Studi Kasus di Pondok Inabah Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat*

Oleh: Yahya AD___ 329-344

Book Review: Pesantren dan Nalar Etik Fiqih

Oleh: Safari Daud___ 345-350

ANALISIS
JURNAL Studi KeislAMAN
Vol.4 No.2 2004

PEMBINA :

Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Noor Chozin Sufri

PENGARAH :

Pembantu Rektor I IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Mahmud Yusuf

PIMPINAN UMUM / PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Yukrim Latief

PEMIMPIN REDAKSI :

M. Akmansyah

REDAKTUR PELAKSANA :

Firdaus Muhammad
Damanhuri
Safari Daud

SEKRETARIS REDAKSI :

Siti Zulaikhah

DEWAN REDAKSI :

Thib Raya (UIN Jakarta)
Akh. Minhaji (UIN Yogyakarta)
Edy Suandi Hamid (UGM Yogyakarta)
Sobirin Malian (JII Yogyakarta)
Jalaluddin (IAIN Raden Fatah Palembang)
Damrah Khair (IAIN Raden Intan Bandar Lampung)
Abi Kusno (IAIN Raden Intan Bandar Lampung)
Nanik Sriyani (Universitas Lampung)
Dad. R.J. Sembodo (Universitas Lampung)

SIRKULASI & KEUANGAN :

Azis Mohadi

SEKRETARIAT :

Bukhari A. Somad
Zulkarnain

COVER & LAY OUT :

Ahmad Fajar Qomaruddin

REDAKSI & TATA USAHA :

Jl: Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame Bandar Lampung
Kode Pos: 35131. Telp: (0721) 780887

PENERBIT :

Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung

DECEMBER 2004, VOLUME 4, NOMOR 2

ISSN 1412-1034

ANALISIS

(JURNAL STUDI KEISLAMAN)

PEREMPUAN, POLITIK DAN



DITERBITKAN OLEH :
PUSAT PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

perempuan, politik dan islam

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF